

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan seringkali dipahami dengan gejala rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat semata, padahal kemiskinan merupakan masalah yang bersifat kompleks dan multidimensi. Tingkat kehidupan yang rendah seringkali dijadikan tolak ukur kemiskinan, padahal tingkat kehidupan yang rendah merupakan salah satu mata rantai dari munculnya lingkaran kemiskinan. Kemiskinan dapat pula dipandang sebagai suatu hal yang absolute dan relatif. Secara umumnya kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan (Ismuningsih, 2010)

Keadaan masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui melalui kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan standar hidup. Sedangkan standar hidup dalam masyarakat bukan hanya sekedar tercukupinya segala kebutuhan akan sandang, pangan, papan, melainkan tercukupi pula kebutuhan kesehatan serta pendidikan (Nugroho dalam Musa 2014).

Menurut Emil, Salim, (1980:41) pengertian kemiskinan dalam artian lebih spesifik: ”*memandang kemiskinan yang digambarkan sebagai rendahnya tingkat pendapatan yang digunakan sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari*”. Disini kebutuhan sehari-hari

termasuk kebutuhan pokok yang mendasar, seperti kebutuhan dalam hal kesehatan, kehidupan yang layak, sifat saling menghargai antar sesama, kehormatan yang diperoleh layaknya orang lain serta kebebasan dalam lingkungan bermasyarakat. Kebutuhan manusia sangat beragam, yang bersifat *multi-dimensional*, aspek kemiskinan apabila dilihat melalui segi *public policy* terdapat 2 aspek antara lain yaitu :

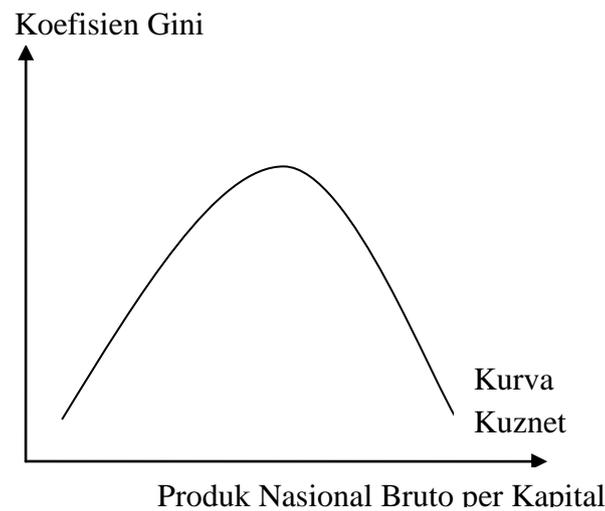
1. Aspek kemiskinan primer, seperti miskinnya asset, wawasan, keterampilan, serta keorganisasian dalam bidang sosial maupun politik.
2. Aspek kemiskinan sekunder, seperti miskinnya jaringan sosial, keuangan, dan informasi

Proses kemajuan ekonomi yang di raih masyarakat saat ini, kebanyakan ada pada masyarakat yang berada dalam bidang perindustrian, dan hal tersebut hampir mendominasi sebagian belahan Dunia, walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama kurang lebih sekitar 3 abad dari revolusi industri dan teknolog, tetapi bisa dilihat proses kemajuannya tidak bisa dipungkiri lagi. Dengan majunya perindustrian dalam suatu Negara masalah kemiskinan tetap tidak mudah dihapuskan. Berdasarkan riset edisi terakhir *World Development Report, The Challenge of Development*, (Oxford University Press 1991), mereka menyimpulkan kurang lebih sekitar 40% jumlah manusia hidup dalam lingkup garis kemiskinan (Ahmad, 1998).

Pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah mampu mencerminkan keberhasilan pada pembangunan yang telah dicapai pada suatu wilayah tersebut. Apabila laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah mengalami peningkatan maka dapat dikatakan telah mampu melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik. Tetapi yang masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini adalah apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah sudah merata keseluruh lapisan masyarakat atau justru sebaliknya. Harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Ketika terjadi peningkatan pendapatan pada masyarakat serta pemerataan terjadi secara menyeluruh, maka kesejahteraan masyarakat akan tercipta dan ketimpangan akan berkurang. Terdapat teori yang mengatakan bahwa ada *trade off* antara ketidakmerataan dan pertumbuhan, namun kenyataannya membuktikan ketidakmerataan di Negara Sedang Berkembang (NSB) dalam dekade belakangan ini ternyata berkaitan dengan pertumbuhan yang rendah, sehingga dibanyak Negara Sedang Berkembang tidak terdapat *trade off* antara pertumbuhan dan ketidak merataan (Mudjarat Kuncoro dalam Adhi.S).

Simon Kuznets mengetakan bahwa tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuh, dan tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan membaik, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan disparitas lagi dan akhirnya menurun kembali. Hal tersebut digambarkan dalam kurva Kuznest yang

menunjukkan bahwa dalam jangka pendek terdapat korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan perkapital dengan disparitas pendapatan. Namun dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi yang negatif.



Sumber: Todaro 2003

**Gambar 2.1**  
Kurva Kuznets

Dimensi atau faktor kemiskinan ada dan termanifestasikan dalam bermacam kategori diantaranya kekurangan gizi, air dan tempat tinggal yang kumuh atau tidak memenuhi standar kebersihan dimana banyak menimbulkan sarang wabah penyakit kronis, tingkat pelayanan kesehatan yang dibawah standar, serta yang terakhir ketersediaan SDM yang belum masuk dalam standar kriteri, yang disebabkan oleh tingkat pendidikan yang berkualitas rendah. Dalam hal ini semua faktor yang disebut diatas mempunyai ikatan secara langsung dan juga tidak langsung, jika salah satu faktor mengalami peningkatan atau penurunan maka akan berpengaruh terhadap faktor-faktor lain (Andre, 1981:6).

Kemiskinan ditandai dengan keterbelakangan dan banyaknya jumlah pengangguran dimana selanjutnya hal itu menyebabkan ketimpangan pendapatan serta kesenjangan antar golongan penduduk, kemiskinan dapat didefinisikan dimana kondisi kehidupan seseorang dalam standar yang rendah, beberapa konsep kemiskinan yang dikenal adalah (Saragih, 2014:22):

1. Kemiskinan Absolut (*absolutely poor*)

Kemiskinan absolut ini dapat digolongkan kedalam 2 bagian yaitu (a) kemiskinan yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) dan (b) kemiskinan yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif ini tidak memiliki batas kemiskinan yang jelas sebagai analogi pendapatan diperoleh seseorang yang tinggal dikawasan elit, walaupun seseorang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya dimana sebenarnya memiliki pendapatan yang cukup, tetapi jika di nilai dalam lingkuan masyarakat pendapatan yang diperoleh seseorang masing rendah dibawah rata-rata, dan mereka merasa masih berada dalam tingkat kemiskinan. Apabila seseorang mengalami perubahan dalam taraf hidup maka hal tersebut akan berdampak pada berubahnya Garis Kemiskinan (GK), kemiskinan memiliki sifat dinamis atau selalu terjadi dalam lingkuang masyarakat.

Mengkaji permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia, terdapat 9 dimensi kemiskinan yang perlu dipertimbangkan diantaranya yaitu:

1. Ketidakmapuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, dan tempat tinggal)
2. Aksebilitas yang rendah terhadap kebutuhan dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, air berseih, transportasi, dan sanitasi yang baik).
3. Lemahnya kemampuan seseorang dalam melakukan akumulasi kapital.
4. Bersifat rentan terhadap goncangan faktor eksternal yang bersifat masal maupun individual.
5. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah serta rendahnya dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).
6. Ketidakterlibatan kegiatan sosial yang ada dalam masyarakat.
7. Akses kesempatan kerja yang terbatas secara berkelanjutan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha akibat terjadi masalah cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dalam lingkup sosial.

Kemiskinan absolut dan relatif merupakan konsep kemiskinan yang mengacu pada seberapa besar kepemilikan materi seseorang atau sebuah keluarga yang dikaitkan dengan standar kelayakan hidup, istilah keduanya itu menunjukkan pada perbedaan sosial yang ada dalam

masyarakat dilihat dari distribusi pendapatan. Perbedaannya bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya telah ditentukan terlebih dahulu yang menggunakan angka-angka nyata (garis kemiskinan) serta indikator kemiskinan atau kriteria yang telah digunakan, sedangkan pada kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan perbandingan relatif dari tingkat kesejahteraan antar masyarakat (Saragih, 2015: 22)

Terdapat 14 kriteria keluarga miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS) antara lain yaitu: 1) bangunan tempat tinggal memiliki luas lantai tidak kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang. 2) lantai tempat tinggal beralaskan tanah atau bamboo atau kayu yang murahan. 3) dinding tempat tinggal terbuat dari bamboo, kayu berkualitas rendah, atau dinding tembok yang tidak diplester. 4) fasilitas buang air besar tidak ada atau bersama-sama dengan rumah tangga lain. 5) penerangan dalam rumah tangga tidak bersumber dari listrik. 6) sumber air yang dikonsumsi tidak diperoleh dari sumur atau air yang dilindungi. 7) arang, kayu bakar, minyak tanah merupakan bahan bakar untuk memasak sehari-hari. 8) konsumsi susu, ayam, dan daging dalam 1 minggu sekali 9) membeli pakaian baru satu stel dalam 1 tahun. 10) makan dalam sehari hanya sanggup 1 sampai 2 kali saja. 11) tidak mampu untuk membayar pengobatan di Puskesmas atau poliklinik. 12) sumber penghasilan rumah tangga adalah sebagai petani dengan luas lahan sebesar 0,5 Ha, nelayan, buruh tani, pekerja bangunan, buruh perkebunan dan lain sebagainya, dimana rata-rata pendapatan di bawah Rp 600.000,- per bulannya 13) pendidikan yang ditempuh paling tinggi

oleh kepala keluarga yaitu tidak sekolah, tidak tamat Sekolah Dasar, dan hanya tamantan Sekolah Dasar. dan 14) tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan kisaran nilai Rp 500.000,- seperti emas, motor, ternak atau barang-barang modal lainnya.

## 2. Ukuran Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*basis need approach*). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan bukan makan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi yang dimaksud penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan (GK). Dan perhitungannya dilakukan pada daerah perkotaan dan daerah pedesaan.

Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat yaitu dimana masyarakat yang memiliki penghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan jumlah tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makan dan non makan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedangkan untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan Paket kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 jenis

komoditi untuk daerah perkotaan dan 47 jenis komoditi di daerah pedesaan (Saragih, 2014:143).

Sedangkan ukuran menurut *World Bank* menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapalnya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan per kapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut World Bank yaitu \$2 per orang per hari (Adhi, 2011).

Penghitungan indikator kemiskinan, menurut Foster Greer Thorbecke 1984 dalam Data Strategi, (2015:76), telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan, dengan rumus sebagai berikut:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

**$\alpha$**  : 0,1,2

**$z$**  : Garis kemiskinan

**$y_i$**  : Rata-rata pengeluaran per capital dalam sebulan untuk penduduk yang berada dalam Garis Kemiskinan ( $i = 1,2,\dots,q$ ),  $y_i < z$

**$q$**  : Banyaknya jumlah penduduk dalam yang berada di bawah Garis Kemiskina (GK)

**$n$**  : Jumlah penduduk

Jika  $\alpha = 0$ , maka diperoleh Head count Index ( $P_0$ ), jika  $\alpha = 1$ , maka diperoleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index- $P_1$* ) serta apabila  $\alpha = 2$  maka disebut dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Indeks- $P_2$* ).

### 3. Penyebab Kemiskinan

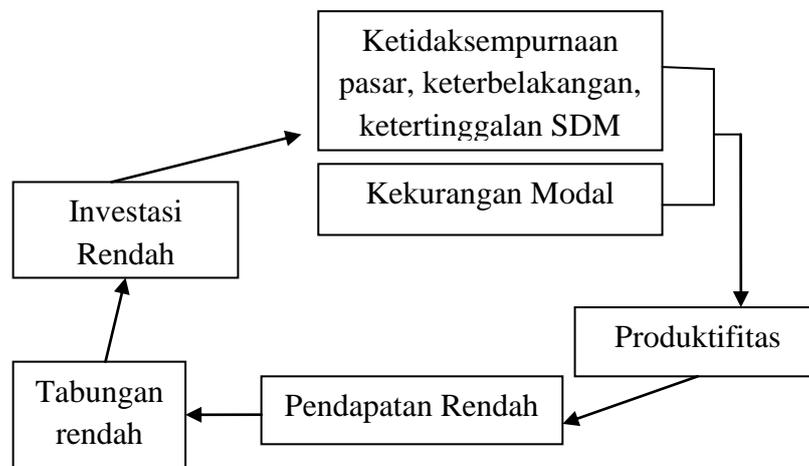
Tidak sedikit penjelasan mengenai sebab-sebab terjadinya kemiskinan, kemiskinan misal yang terjadi di banyak Negara yang baru saja merdeka setelah perang Dunia ke II memfokuskan pada keterbelakangan terhadap perekonomian Negara tersebut sebagai akar dari permasalahannya (Hardiman dan Midgley dalam Kuncoro, 1997:131)

Menurut Kuncoro, penduduk sebuah Negara miskin disebabkan karena menggantungkan diri pada sektor pertanian yang subsistem yang masih memakai metode produksi cara tradisional dimana seringkali dibarengi dengan sikap apatis terhadap lingkungan (Kuncoro, 1997:131).

Mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. *Pertama*, secara mikro yaitu kemiskinan muncul akibat terdapat ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya hal itu menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan pada masyarakat, dalam hal sumber daya kepemilikan penduduk miskin sangatlah terbatas dan kualitasnya rendah jika dibandingkan dengan penduduk yang kaya hasilnya sangatlah berbanding terbalik, dimana penduduk yang dalam kategori kaya dalam hal kepemilikan sumber daya mereka lebih banyak dan juga berkualitas tinggi. *Kedua* kemiskinan muncul akibat dampak perbedaan kualitas

Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah hal itu berarti produktivitasnya rendah yang pada gilirannya upahnya rendah, rendahnya kualitas sumberdaya ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau disebabkan karena keturunan. *Ketiga*, kemiskinan muncul karena adanya perbedaan akses dalam modal (Sharp, et.al. Dalam Sukmaraga, 2011).

Ketiga penyebab kemiskinan diatas bermuara pada teori lingkaran setan (*vicious circle of proverty*), dimana disebabkan akibat adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, serta kurangnya modal yang berdampak rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima.



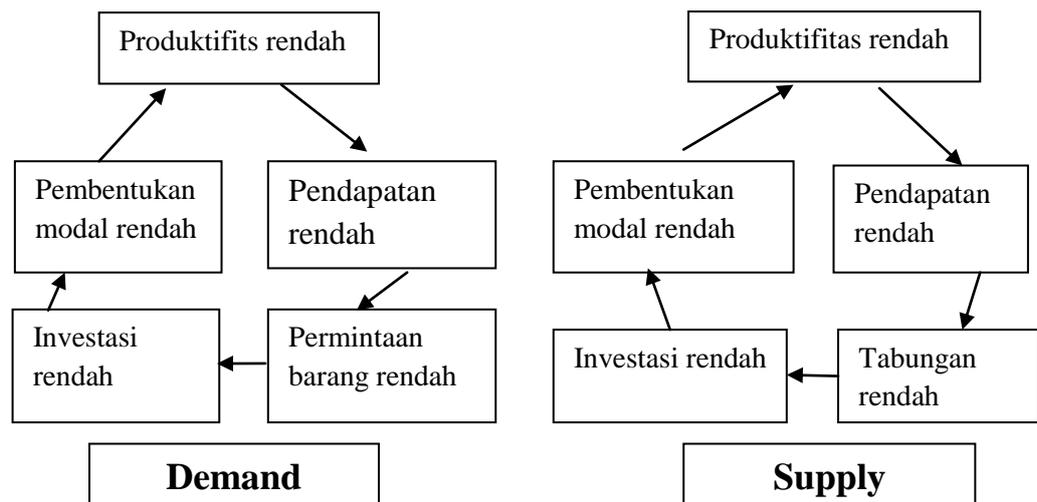
Sumber: Mudrajat, Kuncoro. (1997:132)

**Gambar 2.2**  
Lingkaran Kemiskinan

Rendahnya pendapatan berimplikasi pada rendahnya tabungan serta investasi. Rendahnya tingkat investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya lihat gambar 2.2. Di Negara-negara miskin tidak mungkin dilakukan pertumbuhan pembentukan modal atau

investasi yang tinggi maka dari itu, apabila faktor-faktor tersebut mengalami penurunan maka akan berdampak buruk bagi Negara dimana masyarakatnya akan terjat dalam perangkap kemiskinan (Nurkse dalam Kuncoro, 1997:132).

Dalam pengembangan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki disuatu daerah harus terdapat tenaga kerja yang memiliki keahlian (*skill*) untuk melaksanakan berbagai macam pekerjaan atau kegiatan ekonomi. Kekayaan SDA belum sepenuhnya dikembangkan dan diusahakan dalam Negara berkembang, disebabkan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, sehingga berdampak pada kekuarangan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pengelolaan SDA, serta terbatasnya mobilitas sumber-sumber daya yang terdapat pada Negara tersebut termasuk keterbatasan dalam hal permodalan (Meier dan Baldwin dalam Saragih, 2015:23-24).



Sumber : Suryana, 2000. dalam Sukmaraga, (2011:28)

**Gambar 2.3**

Lingkaran Kemiskinan tak Berujung pangkal,  
oleh Nurkse

Jika dilihat melalui pandangan *Nurkse* ada 2 perangkap yang menjadikan seseorang terjerat kemiskinan yang tidak berujung pangkal yaitu *pertama*, dilihat dari sisi penawaran (*Supply*), apabila tingkat pendapatan rendah berdampak pada tingkat produktifitas rendah, keinginan menabung dan berinvestasi rendah yang akan mengakibatkan modal yang di peroleh rendah berdampak pada kurangnya modal, kurangnya modal mengakibatkan produktifitas menurun, dan seterusnya berputar tiada pangkal. *Kedua*, permintaan (*Demand*), terjadi jika suatu Negara miskin, penanaman modalnya sangat rendah, pembagian barang-barang terbatas akibat terbatasnya pasar, dikarenakan jumlah pendapatan rendah, proses produktifits rendah, pada akhirnya pengumpulan modal rendah serta berkurangnya keinginan dalam menanam modal dan seterusnya perekonomian berputar tanpa ujung.

Meskipun banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli sehubungan dengan sebab-sebab terjadinya kemiskinan di masyarakat, paling tidak terdapat 2 macam teori yang lazim dipergunakan untuk menjelaskan akar dari kemiskinan itu sendiri diantaranya adalah teori marginalisasi dan teori ketergantungan. Dalam teori marginalisasi, kemiskinan dianggap akibat dari tabiat apatis, fatalism, tergantung, rendah hati, pemborosan, dan konsumtif, serta kurangnya seseorang yang berjiwa wiraswasta (Usman, 1993:23-27, dalam Kandji).

#### 4. Teori Pertumbuhan Ekonomi

##### a. Tahapan Pertumbuhan Rostow

Menurut Rostow transaksi dari keterbelakangan sampai perekonomian yang lebih maju dapat diuraikan dalam langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilalui berbagai Negara. Berdasarkan argumentasinya, Negara –negara maju dinyatakan telah melewati semua tahap “lepas landas ke pertumbuhan yang berkelanjutan dengan sendirinya”, disamping itu bagi Negara-negara yang terbelakang yang masih berada dalam tahap masyarakat tradisional atau dalam tahap “prakondisi” mereka hanya perlu mengikuti seperangkat aturan pembangunan tertentu untuk lepas landas menuju masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Strategi utama dalam pembangunan yang dibutuhkan untuk lepas landas yaitu mobilitas tabungan dalam serta luar negeri, dimana bermanfaat untuk menghasilkan investasi yang cukup guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Mekanisme ekonomi dimana tingkat investasi yang tinggi maka akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi lebih besar, dan dapat diuraikan dengan model pertumbuhan Harrod-Domar, yang sekarang lebih dikenal dengan model  $AK$  karena didasarkan atas fungsi produksi linier dengan output yang di hasilkan dari persediaan modal  $K$  dikalikan dengan sebuah bilangan tetap atau konstanta (*Costant*) yang sering diberi label  $A$ . dalam berbagai bentuk, model ini sering diterapkan dalam menangani berbagai isu kebijakan

yang dihadapi oleh berbagai Negara berkembang, seperti model dua kesenjangan (*two gap model*).

b. Model Pertumbuhan Harrod-Domar

Setiap perekonomian harus menabung pada bagian tertentu dari pendapatannya, yang berguna untuk sekedar mengganti barang-barang modal yang habis atau rusak seperti gedung, peralatan, serta bahan-bahan lainnya. Disamping agar bisa tumbuh diperlukan investasi yang merupakan tambahan nota kedalam persediaan modal. Apabila kita mengasumsikan adanya hubungan ekonomi secara langsung antara jumlah persediaan modal (K) dan total GDP (Y).

c. Teori Klasik

1. Adam Smith (1723-1790)

Adam Smith bukan hanya terkenal sebagai pelopor pembangunan ekonomi serta kebijakan *laisser-faire*, akan tetapi juga dikenal sebagai pakar ekonom pertama yang banyak menumpahkan perhatiannya kepada masalah tentang pertumbuhan ekonomi. Bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776) mengemukakan mengenai proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis. Supaya inti dari proses pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith mudah dipahami, kita bedakan dua aspek utama ekonomi yaitu:

1). Pertumbuhan output total

Terdapat unsur pokok dari sebuah sistem dalam suatu Negara menurut Smith diantaranya yaitu. *Pertama*, sumber daya alam yang tersedia (seperti faktor produksi “tanah”), *Kedua*, sumber daya manusia (jumlah penduduk), *Ketiga*, stok barang modal yang ada.

Menurut Smith Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi pada suatu masyarakat. Jumlah SDA yang tersedia merupakan “batas minimum” bagi pertumbuhan perekonomian. Yang artinya, apabila sumber daya belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk serta stok modal yang ada, adalah yang memegang dan berperan dalam pertumbuhan output. Tetapi sebaliknya apabila pertumbuhan output tersebut akan berhenti pada semua Sumber Daya Alam (SDA) tersebut telah digunakan secara penuh.

Sumber Daya Manusia (SDM) atau jumlah penduduk mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Artinya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja di masyarakat.

Kemudian stok modal, menurut Adam Smith stok modal merupakan unsur produksi yang aktif yang menentukan tingkat output. Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah serta tingkat pertumbuhan output tergantung

pada laju pertumbuhan stok modal sampai batas maksimum dari Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia.

Pengaruh stok modal terhadap tingkat output dapat secara langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung artinya dampak dari penambahan modal (sebagai input) maka akan langsung meningkatkan output. Sedangkan pengaruh tidak langsung artinya peningkatan produktivitas per kapital yang dimungkinkan oleh karena adanya spesialisasi dan pembagian kerja yang lebih tinggi. Semakin besar stok modal, menurut Smith maka semakin besar kemungkinan dilakukannya spesialisasi serta pembagian kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas per kapital.

## 2). Pertumbuhan Penduduk

Menurut Adam Smith, jumlah penduduk akan mengalami peningkatan jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk bertahan hidup. Jika tingkat upah diatas tingkat subsisten, maka orang-orang akan menikah pada usia muda, tingkat kematian menurun, dan jumlah kelahiran meningkat. Sebaliknya jika tingkat upah yang berlaku lebih rendah dari tingkat upah subsisten, maka jumlah penduduk akan menurun.

Tingkat upah yang berlaku, menurut Adam Smith ditentukan oleh tarik-menarik antara kekuatan permintaan dan

penawaran atas tenaga kerja. Tingkat upah yang tinggi dan jika permintaan meningkat akan tenaga kerja ( $D_L$ ) tumbuh lebih cepat daripada penawaran tenaga kerja ( $S_L$ ). Sementara itu permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh stok modal serta tingkat output masyarakat. Oleh karenanya, laju pertumbuhan permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan stok modal (akumulasi modal) dan laju pertumbuhan ekonomi.

## 2. David Ricardo (177-1823)

Apabila Adam Smith dianggap sebagai pakar utama serta pelopor pemikiran ekonomi mazhab kalsik, maka David Ricardo menjadi pemikir yang paling menonjol diantara para pakar mazhab klasik tersebut. Ricardo sebenarnya merupakan seorang praktisi yang berasal dari keluarga pedagang menengah dan tidak pernah menuntut pelajaran formal di lembaga pendidikan tinggi. Dalam usia muda ia sangat berhasil sebagai pialang (*stok broker*) di Busra Uang serta Modal di London.

Perangkat teori yang dikembangkan Ricardo menyangkut 4 kelompok permasalahan diantaranya yaitu, 1) teori tentang nilai dan harga barang; dan berkaitan dengan itu. 2) teori tentang distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan diajikan sebagai teori upah, teori sewa tanah, teori buanga serta teori laba. 3) teori tentang perdagangan internasional. 4) teori tentang akumulasi dan pertumbuhan ekonomi.

Garis besar proses pertumbuhan serta berbagai kesimpulan dari Ricardo tidak jauh berbeda dengan teori Adam Smith. Tema dari proses pertumbuhan ekonomi masih pada hubungan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output. Selain hal tersebut Ricardo juga menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (SDA) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya menjadi factor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat. Teori Ricardo diungkap pertama kali dalam bukunya yang berjudul *The Principles or Political Economy and Taxation*.

### 3. Teori Neo Klasik (Solow-Swan)

Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik berkembang sejak 1950-an. Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi bergantung kepada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi seperti penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal serta tingkat kemajuan teknologi. Berdasarkan penelitiannya, Solow (1957) mengatakan bahwa peran dari kemajuan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Temuan Solow menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi AS yang setinggi 2,7% per tahun pada periode 1909-1949, sebesar 1,5% merupakan sumbangan dari kemajuan teknologi sedangkan sisanya disebabkan oleh penambahan jumlah penggunaan faktor produksi.

Pandangan teori ini berdasarkan pada anggapan yang mendasari analisis klasik yaitu, perekonomian akan mengalami tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai dimana perekonomian akan berkembang tergantung pada penambahan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi.

#### 4. Distribusi Pendapatan

##### a. Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan

Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti dari permasalahan pembangunan. Walaupun titik perhatian utama kita pada ketidakmerataan distribusi pendapatan dan harta kekayaan (*assets*), namun hal tersebut hanyalah merupakan sebagian kecil dari masalah ketidakmerataan yang lebih luas di Negara Sedang Berkembang (NSB). Misalnya kekuasaan, prestise, status, kepuasan kerja, kondisi kerja, tingkat partisipasi, kebebasan untuk memilih, dan lain-lain.

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap masalah ketidakmerataan dan kemiskinan ini memberikan dasar yang baik untuk menganalisis masalah pembangunan yang lebih khusus seperti: pertumbuhan penduduk, pengangguran, pembangunan pedesaan, pendidikan, perdagangan

internasioanl, dan sebagainya. Pembahasan masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan ini sebenarnya sulit untuk dipisahkan. Namun demikian, pada bagian ini lebih ditekannkan pada pembahasan masalah distribusi pendapatan dengan menyinggung sedikit masalah kemiskinan.

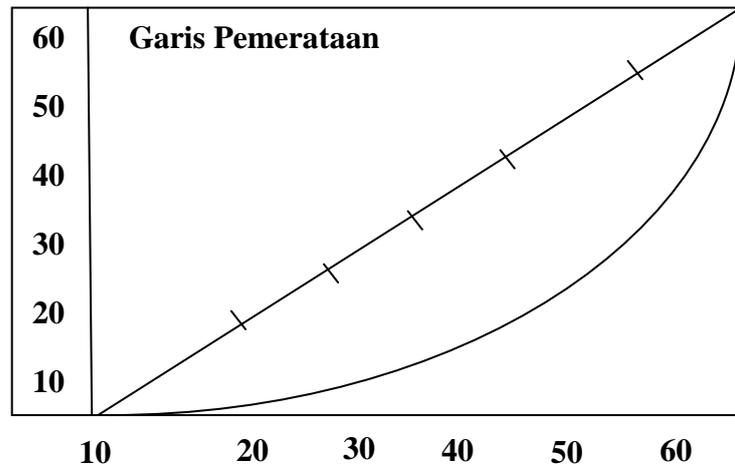
Para ekonom biasanya membedakan dua ukuran utama distribusi pendapatan untuk tujuan analisis dan kuantitatif, diantaranya yaitu distribusi pendapatan perorangan atau disebut dengan distribusi ukuran pendapatan serta distribusi pendapatan fungsional atau dikenal dengan distribusi pendapatan per faktor produksi.

#### 1). Distribusi ukuran pendapatan (*size distribution of income*)

Distribusi ukuran pendapatan (*size distribution of income*) atau distribusi pendapatan perorangan (*personal distribution of income*) merupakan ukuran yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini hanya menghitung jumlah pendapatan perorangan atau rumah tangga, cara memperoleh pendapatan tidak dipertimbangkan. Faktor yang penting yaitu seberapa besar perolehan masing-masing orang atau rumah tangga tanpa mempersoalkan apakah pendapatan itu hanya diperoleh dari gaji atau upahnya dihasilkan melalui sumber lain seperti bunga, laba dalam usaha, uang sewa, hibah, atau warisan.

Selain itu, jenis lokasi yang berada di desa atau kota serta jenis pekerjaan dari sumber pendapatan misalnya pertanian, perdagangan, jasa atau manufaktur juga diabaikan. Cara lain untuk menganalisis distribusi pendapatan perorangan melalui kurva yang disebut Kurva Lorenz.

Kurva Lorenz diatas menunjukkan hubungan kuantitatif antara presentase penduduk dan presentase pendapatan yang mereka terima. Jumlah penerima pendapatan ditempatkan pada sumbu horizontal, tidak dalam angka absolute tetapi dalam presentase komulatif. Semakin dekat ke titik diagonal (semakin lurus) berarti distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya jika kurva Lorenz semakin jauh dari titik diagonal (semakin melengkung) maka berarti distribusi pendapatan semakin timpang dan tidak merata. Sebagai contoh pada titik 20 kita memiliki 20% kelompok penduduk paling bawah (paling miskin), pada titik 60 kita memiliki 60% kelompok penduduk bagian bawah, dan pada ujung sumbu 100% atau semua penduduk telah terhitung. Pada sumbu vertikal terlihat bagian pendapatan total yang diterima oleh setiap presentase jumlah penduduk. Bagian pendapatan ini juga diakumulasikan sampai 100%, yang berarti bahwa ukuran kedua sumbu itu sama.



Sumber: Todaro dan Smith

**Gambar 2.4**  
Kurva Lorenz

Gambar diatas berbentuk bujur sangkar dengan garis diagonal yang ditarik dari sudut bawah bagian kiri (awal garis) ke sudut atas kanan bujur sangkar. Pada setiap titik pada garis diagonal itu presentase jumlah pendapatan yang diterima sama persis dengan presentase jumlah penerimaan pendapatan. Misalnya pada titik bagian tengah garis diagonal mewakili 50% bagian pendapatan yang di distribusikan kepada 50% penduduk. Pada titik tiga per empat garis diagonal 75% penduduk. Dengan kata lain, garis diagonal dalam gambar 2.4 menunjukkan adanya pemerataan sempurna (*perfect equality*) dari distribusi ukuran pendapatan. Setiap kelompok presentase penerima pendapatan memperoleh presentase yang sama dari pendapatan total, misal 40% kelompok penduduk di bagian paling bawah menerima 40% dari pendapatan. Sedangkan 5%

kelompok penduduk di bagian paling atas menerima 5% dari pendapatan total.

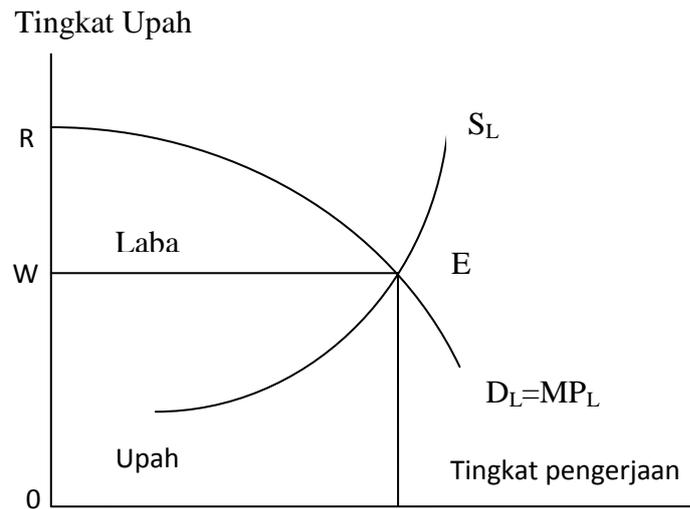
## 2). Distribusi Pendapatan Fungsional

Distribusi fungsional atau distribusi pangsa faktor produksi (*factor share distribution*). Ukuran distribusi ini berusaha untuk menjelaskan pangsa (*share*) pendapatan nasional yang diterima oleh tenaga kerja secara keseluruhan dibanding dengan presentase dari pendapatan nasional yang terdiri dari sewa, bunga dan laba.

Menurut asumsi pasar persaingan, permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh produksi marginal (*Marginal Product*) dari tenaga kerja tersebut ( $MP_L$ ), yaitu tambahan pekerja akan pekerjaan sampai pada titik dimana nilai produksi marginalnya (*Value of Marginal Product* =  $VMP_L$ ) sama dengan tingkat upah riil. Tetapi sesuai dengan prinsip produk marginal yang menurun (*The Law of Dimishing Returns*), permintaan tenaga kerja ini akan merupakan suatu fungsi yang menurun dari jumlah yang dipekerjakan.

Berdasarkan gambar 2.5, kurva permintaan tenaga kerja yang berslope negatif tersebut ditunjukkan pada garis  $D_L$ , dengan kurva penawaran tenaga kerja  $S_L$ , tingkat upah keseimbangan akan sama dengan  $OW$  dan tingkat keseimbangan penggunaan tenaga kerja adalah  $OL$ .

Pendapatan Nasional ini terbagi menjadi 2 yaitu OWEL merupakan pangsa tenaga kerja dalam bentuk upah dan WRE merupakan kaum kapitalis.



Sumber: Todaro dan Smith

**Gambar 2.5**  
Distribusi Pendapatan Fungsional  
dalam Suatu Perekonomian Pasar

Dalam suatu pasar persaingan dengan fungsi produksi yang bersifat *constant returns to scale*, harga-harga faktor produksi ditentukan oleh kurva penawaran dan permintaan akan faktor produksi tersebut. Pendapatan distribusi menurut fungsi yaitu tenaga kerja menerima upah, pemilik tanah menerima sewa, kaum kapitalis menerima laba. Hal tersebut merupakan teori yang murni dan logis karena masing-masing faktor produksi memperoleh pembayaran hanya sesuai dengan kontribusinya terhadap pendapatan Nasional.

Tetapi sayangnya relevansi fungsional ini dilemahkan oleh kegagalan dalam memperhitungkan peranan dan pengaruh penting dari kekuatan-kekuatan non-pasar seperti kekuatan untuk menentukan harga-harga faktor produksi, misalnya terdapat perjanjian bersama antara para pekerja dan kekuatan para monopolis atau tuan tanah dalam penetapan tingkat upah.

## **B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB merupakan suatu nilai bersih dari barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu (Hadi, Sasana. 2016). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki, oleh karena itu besaran- besaran PDRB yang dihasilkan pada masing-masing daerah sangat tergantung pada potensi SDA serta faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut berdampak pada besaran PDRB yang bervariasi antar daerah (Adhi, 2011).

Pendekatan PDRB yang digunakan dalam menghitung angka-angka yang dihasilkan oleh suatu wilayah yaitu : *Pertama*, Pendekatan Produksi. *Kedua*, Pendekatan Pengeluaran. *Ketiga*, Pendekatan Pendapatan. Pendekatan produksi adalah nilai keseluruhan yang diperoleh dari nilai tambah barang atau jasa yang hasil seluruh unit produksi juga sektor disuatu daerah dalam periode waktu tertentu (biasanya diambil dalam waktu satu tahun). nilai yang

diperoleh dari satu sektor selanjutnya akan di rinci kembali menjadi subsektor.

Beberapa pembagian Unit produksi dalam sektor lapangan usaha antara lain :

1. Sektor pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan
2. Sektor Pertambangan dan penggalian
3. Sektor industri pengolahan
4. Gas, listrik, dan air bersih
5. Konstruksi
6. Sektor perdagangan, perhotelan, dan restoran
7. Sektor komunikasi dan pengangkutan
8. Sektor jasa perusahaan, keuangan, dan real estate
9. Sektor yang mencakup semua jasa-jasa termasuk jasa Pemerintah dan lain-lain.

Kedua, pendekatan pengeluaran yang diperoleh dari seluruh komponen-komponen permintaan akhir antara lain seperti:

1. Pengeluaran akhir konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirbala (tidak mencari laba)
2. Pengeluaran akhir konsumsi pemerintah
3. Investasi atau pembentukan modal tetap domestik bruto
4. Perubahan pada investor
5. Jumlah Ekspor neto (ekspor - impor)

Pendekatan PDRB diperoleh dari jumlah balas jasa melalui faktor-faktor produksi khususnya bagi faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produk pada suatu daerah dalam periode tertentu (biasanya

satu tahun). Balas jasa yang dimaksud disini dalam faktor produksi merupakan upah gaji, upah sewa tanah, bunga modal dan keuantungan kotor pada suatu perusahaan. Namun semua yang diperoleh diatas tidak mencakup dari potongan pajak penghasilan atau pajak langsung lainnya. Jika terjadi Penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tidak langsung - subsidi) juga mencakup dalam perhitungan PDRB.

Secara konseptual akan diperoleh hasil dari ketiga pendekatan diatas dalam bentuk nilai yang sama. Maka, jumlah pengeluaran akan diperoleh nilai sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang diproduksi, hasil tersebut harus sama dengan jumlah pendapatan faktor-faktor produksi. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan sama dengan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar, karena sudah mencakup dalam pajak tidak langsung neto (pajak tidak langsung - subsidi). Penyusunan PDRB berdasarkan BPS disajikan dalam 2 konsep yaitu:

1. PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai jumlah produksi dan pengeluaran serta pendapatan yang dihitung atas dasar harga tetap. Penghitungannya dengan menggunakan tingkat dasar perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), secara riil kemampuan suatu wilayah diperoleh dari perhitungan harga konstan sama dengan perhitungan ekonomi.
2. PDRB atas dasar harga berlaku adalah seluruh nilai tambah dari seluruh sektor di lingkup perekonomian di suatu daerah, juga

mencakup nilai produksi, nilai antar seluruh unit yang digunakan dalam proses produksi maupun penilaian komponen PDRB lainnya. Perhitungan PDRB atas dasar berlaku menggambarkan semua pihak yang ikut andil dalam sektor ekonomi.

### C. Pengangguran

Secara internasional Pengangguran adalah seseorang yang termasuk didalam kelompok angkatan kerja dan seseorang tersebut secara aktif sedang mencari kerja dan berada pada tingkat upah tertentu, tetapi dengan usahanya seseorang tetap tidak memperoleh pekerjaan yang sesuai keinginan (Sadono dalam Sukmaraga, 2011).

Berdasarkan Tambunan, 2001 dalam adhi saputra 2011, pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara antara lain yaitu:

1. Apabila sebuah rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang berarti bahwa tingkat konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka masalah pengangguran akan secara langsung mempengaruhi *income poverty rate* dengan *consumption poverty rate*.
2. Apabila sebuah rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas yang berarti bahwa tingkat konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam

jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.

Pengangguran merupakan keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran yaitu kekurangan pengeluaran agregat. Para usaha memperoleh barang dan jasa bermaksud untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang atau jasa yang mereka produksi dan berikan kepada konsumen. Jika semakin besar permintaan, maka semakin besar pula barang dan jasa yang akan diproduksi. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat diantara tingkat pendapatan nasional (PDB) yang dicapai dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan, maka semakin tinggi pendapatan nasional, dan semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian suatu negara (Sukirno dalam Moh.Rifqi, 2014).

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya kesempatan kerja (*Employment*) di DIY, terlebih dahulu memperhitungkan juga masalah pertambahan pengangguran terbuka dimana jumlahnya lebih besar, dimana mereka yang kelihatan aktif bekerja namun jika dilihat secara ekonomi sebenarnya mereka tidak bekerja secara penuh (*Underutilized*). Menurut Edgar (1974), untuk melakukan pengelompokan

terhadap jenis-jenis pengangguran, sebaiknya perlu memahami dimensi-dimensi berikut ini:

- a. Waktu, banyak diantara mereka yang ingin bekerja lebih lama, misalnya dalam jam kerjanya per hari, per minggu, atau per tahun.
- b. Intensitas pekerjaan, yang berhubungan dengan kesehatan dan gizi makanan.
- c. Produktivitas, kurangnya produktivitas seringkali disebabkan oleh kurangnya sumber daya komplementer dalam melakukan pekerjaan.

Meskipun hal-hal diatas merupakan dimensi yang paling nyata bagi seseorang untuk dapat bekerja secara efektif, namun beberapa faktor lainnya seperti motivasi, sikap, serta hambatan-hambatan budaya juga harus juga diperhatikan. Beberapa kriteria tersebut Edwards mengklasifikasikan beberapa jenis pengangguran, yaitu:

1. Pengangguran terbuka, baik sukarela atau mereka yang tidak ingin bekerja karena mengharapkan sesuatu yang lebih baik, maupun secara terpaksa dimana mereka yang bekerja namun tidak memperoleh pekerjaan.
2. Stengah Menganggur (*Underemployment*), mereka yang bekerja selama musiman, harian, atau mingguan, dimana kurang dari waktu yang mereka mampu untuk mengerjakan.
3. Tampaknya bekerja namun tidak bekerja secara utuh yaitu, mereka yang tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka dan setengah menganggur, yaitu antara lain:

- a. Pengangguran tidak kentara (*disguised unemployment*) yaitu, para petani yang bekerja di lading selama sehari penuh, padahal pekerjaan tersebut tidak membutuhkan waktu selama sehari penuh.
  - b. Pengangguran tersembunyi (*hidden unemployment*) yaitu, mereka yang bekerja tidak sesuai dengan tingkat atau pendidikannya.
  - c. Pension lebih awal yaitu, merupakan fenomena kenyataan yang terus berkembang di kalangan pegawai pemerintah. Di beberapa Negara, usia pension dipermudah sebagai alat untuk menciptakan peluang bagi kaum muda untuk dapat menduduki jabatan di atasnya.
4. Tenaga kerja yang lemah (*impaired*) yaitu, mereka yang mungkin bekerja dalam waktu penuh (*full time*), namun intensitasnya rendah atau lemah karena kurang gizi atau memiliki sebuah penyakit.
  5. Tenaga kerja yang tidak produktif yaitu, mereka yang mampu untuk bekerja secara produktif, namun karena sumber daya komplementernya kurang memadai, maka mereka tidak dapat menghasilkan sesuatu dengan baik.

#### **D. Jumlah Penduduk**

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk yaitu, sekelompok orang yang tinggal pada suatu wilayah atau daerah terhitung dalam waktu 6 bulan atau lebih, serta mempunyai pekerjaan yang menetap di daerah tersebut dan tercatat sah sebagai penduduk, berdasarkan peraturan pemerintah daerah. Terjadi penambahan penduduk disebabkan oleh 3 komponen antara lain yaitu:

## 1. Fertilitas

Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Natalitas memiliki arti yang sama dengan fertilitas hanya yang berbeda dari ruang lingkupnya, dalam fertilitas menyangkut peranan kelahiran para perubahan penduduk sedangkan Natalitas mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk dan reproduksi manusia.

## 2. Mortalitas

Mortalitas atau yang dikenal dengan kematian merupakan salah satu diantara tiga komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Informasi mengenai kematian sangatlah penting, bukan hanya pada pihak pemerintah melainkan juga bagi pihak swasta, yang terutama yang bergelut dengan dunia ekonomi serta kesehatan. Kematian merupakan keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen, yang dapat terjadi kapan saja setelah kelahiran hidup. Pengumpulan data kematian sangat diperlukan antara lain untuk proyeksi penduduk guna dalam proses perencanaan pembangunan. Misalnya, fasilitas pendidikan, jasa-jasa untuk kepentingan masyarakat. Data kematian juga diperlukan untuk kepentingan evaluasi terhadap program-program kebijakan penduduk.

### 3. Migrasi

Migrasi penduduk merupakan perpindahan penduduk dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Apabila terjadi kesenjangan pendapatan di suatu daerah maka akan menimbulkan berbagai permasalahan seperti peningkatan migrasi dari daerah yang miskin ke daerah yang lebih maju, kriminalitas, dan konflik antar masyarakat. Dalam konteks kenegaraan kesenjangan akan mengurangi kepercayaan atau keutuhan suatu Negara. Maka dari itu, kesenjangan harus diatasi oleh pemerintah dengan mendorong daerah yang miskin untuk mampu mengejar ketertinggalan perekonomian terhadap daerah yang telah maju, sehingga migrasi atau sebab-sebab lainnya tidak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam pembangunan ekonomi, Meningkatnya penduduk disuatu daerah dapat menjadi faktor pendorong atau penghambat, jika 1) faktor pendorong, apabila jumlah penduduk tinggi berdampak tenaga kerja yang tinggi. 2) faktor penghambat, apabila disuatu daerah terjadi perluasan pasar barang dan jasa, dalam perluasan pasar tersebut yang di tunjang dengan 2 faktor yaitu, pendapatan penduduk serta jumlah penduduk, jika peningkatan penduduk menjadi faktor penghambat seperti banyaknya penduduk tetapi tidak memiliki keterampilan atau skill yang menunjang dikarenakan pendidikan rendah atau karena faktor-faktor penghambat lainnya, maka dalam proses pembangunan yang dilakukan, akibatnya akan berpengaruh pada penurunan tingkat produktifitas yang akibatnya banyak pengangguran dalam suatu daerah (Sukirno, 1997).

Kecenderungan umum penduduk suatu Negara berdasarkan deretan umur yaitu dua-kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu pada saat yang bersamaan, dikarenakan hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan tidak dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, maka pendapatan per kapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan per kapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang berdampak pada jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit di atas tingkat subsistensi (Maltus dalam Adhi, 2011).

Pada kalangan pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap penawaran (Supply) bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi proses pengembangan tabung, cadangan devisa, serta sumber daya manusia (Maier dalam Kuncoro, 1997).

Terdapat 3 alasan dimana pertumbuhan penduduk yang cenderung tinggi akan mengakibatkan perlambatan proses pembangunan antaralain yaitu:

- i. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan membutuhkan konsumsi yang tinggi dimasa mendatang. Rendahnya sumber daya per kapita akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat, yang gilirannya membuat investasi dalam “kualitas manusia” semakin sulit.
- ii. Banyak Negara dimana penduduknya masih sangat tergantung pada sektor pertanian, terjadinya pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan antar sumber daya alam yang langka. Karena pertumbuhan penduduk memperlambat perpindahan penduduk dari

sector pertanian yang rendahproduksifitasnya ke sektor pertanian modern serta pekerjaan modern lainnya.

- iii. Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat dimana berdampak pada terjadinya masalah –masalah baru dalam manata maupun mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat.

#### **E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Berdasarkan BPS, Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia atau kesejahteraan yang berjalan dalam suatu daerah, pengukuran indeks ditunjukkan melalui angka kesehatan, pendidikan dan pengeluaran per kapita atau daya beli masyarakat yang dihitung dalam kurun waktu tertentu (biasanya dalam satu tahun).

Ukuran pembangunan yang digunakan selama ini, yaitu PDB dalam konteks Nasional dan PDRB dalam konteks daerah regional, hanya mampu memotret pembangunan ekonomi saja. Karena itu dibutuhkan suatu indikator yang lebih komprehensif, yang mampu menangkap tidak saja perkembangan ekonomi semata tetapi juga perkembangan aspek sosial serta kesejahteraan manusia. Pembangunan manusia memiliki banyak dimensi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran agregat dari dimensi dasar pembangunan manusia dengan melihat

perkembangannya. Perhitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, antara lain:

- a. Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.
- b. Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.
- c. Membentuk satu indeks komposit daripada menggunakan sejumlah indeks dasar.
- d. Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi. Indeks tersebut merupakan indeks dasar yang tersusun dari dimensi berikut: umur panjang yaitu kehidupan yang sehat, dengan indikator angka harapan hidup, pengetahuan, yang diukur dengan angka melek huruf serta kombinasi dari angka partisipasi sekolah untuk tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Yang terakhir di nilai dari tingkat standar hidup layak, dengan indikator PDRB per kapita dalam bentuk *Purchasing Power Parity* (PPP).

Konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan pada skala 0,0-100,00 dengan kategori sebagai berikut:

1. Tinggi IPM lebih dari 80,00
2. Menengah atas : IPM antara 66,00-79,9
3. Menengah bawah: IPM antara 50,00-65,9
4. Menengah rendah : IPM kurang dari 50,0.

Rumus Komponen-komponen IPM sebagai berikut:

$X_i$  = Indikator komponen IPM ke  $i$  dimana  $i = 1, 2, 3$

$X_{i \text{ Max}}$  = Indikator Maksimum  $X_i$

$X_{i \text{ Min}}$  = Indikator Minimum  $X_i$

$$\text{Indeks } X_i = \frac{X_i - X_{i \text{ Min}}}{X_{i \text{ Max}} - X_{i \text{ Min}}}$$

#### 1. Indek Harapan Hidup

Indeks Harapan Hidup merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur seberapa lama jumlah hidup yang seseorang diharapkan dapat dinikmati penduduk pada suatu wilayah tertentu, dengan cara menggunakan informasi angka kelahiran serta kematian per tahun. Dalam komponen ini diharapkan akan tercermin rata-rata angka lama hidup sekaligus angka hidup sehat masyarakat.

**Tabel 2.1.**  
Standar Nilai Komponen IPM

No	Komponen	Nilai Maksimum	Nilai Minimum
1.	Angka Harapan Hidup (tahun)	83,04	20
2.	Angka Lama Sekolah (EYS/tahun)	18	0
3.	Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	15	0
4.	Pengeluaran per Kapital Disesuaikan	26.572.352** (IDR)	1.007.436* (IDR)

Sumber : Data Strategi DIY 2015

Ket : \*Daya beli minimum garis kemiskina terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yakni di Tolokara-Papua

\*\*Daya beli Maksimum yakni nilai tertinggi kabupaten diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yakni perkiraan pengeluaran perkapital Jakarta Selatan pada tahun 2025

Metode tidak langsung (*Brass, Varian Trussel*) digunakan jika mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi orang yang telah meninggal dalam kurun waktu tertentu, dalam metode ini data dasar yang diperlukan adalah rata-rata anak yang baru lahir serta rata-rata anak yang masih hidup dari seorang wanita yang telah menikah. Dalam singkatnya, proses penghitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program *Mortpak*. nilai maksimum dan minimum untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup pada tabel 2.1.

## 2. Indeks Pendidikan

Komponen pendidikan merupakan faktor yang cukup penting dalam pembangunan. Dimana pendidikan adalah upaya untuk melatih karakter atau budi pekerti (kekuatan batin) dan intelektual anak, agar dapat memajukan standar hidup selaras dengan dunianya, pendidikan yang baik dan berkualitas akan dapat mencetak generasi-generasi yang tangguh serta memiliki daya saing yang tinggi.

Berdasarkan Amrullah.S (2016) terdapat 3 macam pendidikan anak diantaranya yaitu:

1. Pendidikan Formal yaitu pendidikan yang ada dalam lingkup lembaga Pemerintahan, yang dijalankan sesuai kebijakan pemerintah diantaranya, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Akhir (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sampai ke tingkat Perguruan Tinggi Negeri.

2. Pendidikan Informal yaitu, pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan dalam keluarga iantaranya seperti, pendidikan akhlak, moral anak, keagamaan, cara berinteraksi terhadap sesama dan pendidikan lainnya yang belum tentu diperoleh dalam pendidikan formal.
3. Pendidikan Non-formal yaitu, pendidikan yang diperoleh melalui masyarakat yang sistematis dan terorganisir, dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal berada diluar sistem pendidikan formal, seperti kegiatan membentuk karakteristik atau bakat anak seperti: les alat-alat musik, olah raga, menari dan lain sebagainya.

Dalam perhitungan Indeks Pendidikan terdapat 2 indikator, yakni angka melek huruf (Lit) serta rata-rata lama sekolah (MYS), dimana dalam pengukurannya menggunakan jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas disebabkan pada kenyataannya penduduk pada usia tersebut sudah banyak yang berhenti dalam sekolahnya. Batasan ini sebagai patokan agar angka-angka yang diperoleh lebih mencerminkan kondisi pendidikan yang sebenarnya mengingat pada usia 15 tahun kebawah kebanyakan masih dalam proses sekolah atau akan melanjutkan sekolah, sehingga belum pantas untuk digunakan sebagai gambaran rata-rata lama sekolah.

Indikator tersebut diharapkan dapat menggambarkan tingkat pengetahuan penduduk yang mencerminkan tingkat angka melek huruf (Lit), dimana kemampuan melek huruf diambil dari penduduk yang

memiliki kemampuan baca tulis dan mampu menyerap berita dari berbagai media. Sedangkan gambaran angka MYS diambil dari keterampilan yang dimiliki masyarakat secara keseluruhan, penghitungan MYS secara tidak langsung pertama-tama dengan faktor konversi terhadap variabel pendidikan yang ditamatkan selanjutnya menghitung rata-rata dari variabel sesuai dengan bobotnya.

Kemudian setelah diperoleh angka Lit dan MYS, dilakukan penyesuaian agar kedua nilai ini berada pada skala yang sama yakni antara 0 – 1, setelah kedua nilai disesuaikan ini disatukan untuk mendapatkan indeks pendidikan dengan perbandingan bobot 2 untuk Lit dan 1 untuk MYS sesuai dengan yang telah ditentukan UNDP. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IP = 2/3 \text{ Indeks Lit} + 1/3 \text{ Indeks MYS} \dots\dots\dots(2.1)$$

Pada saat proses pelaksanaan pembangunan, melalui pemberantasan buta aksara merupakan upaya penting untuk membenahi indeks manusia, apabila program pendidikan berhasil maka akan menimbulkan rasa percaya diri penduduk. Dimana rasa tersebut tumbuh dan berupaya memberantas kemiskinan yang mereka alami.

### 3. Indeks Standar Hidup Layak

Aspek kehidupan yang layak yang diukur dari daya beli masyarakat (pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan), UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP adjusted. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan akan ditentukan dari

nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, perhitungannya dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dijadikan konstan/riil dengan menggunakan tahun dasar 2012 = 100. Perhitungan paritas daya beli yang diterapkan pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non-makanan. Metode paritas daya beli menggunakan Metode *Rao* dalam penghitungannya (Data Strategi, 2015:119).

Dalam penggunaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah untuk memberikan gambaran untuk memberi penentuan pada kebijakan utama yang lebih prioritas dalam pembangunan yang dijalankan, hal ini bermanfaat agar proses pengalokasian anggaran sepadan terhadap kebijakan umum yang telah ditentukan oleh si pembuat keputusan dan pembuat kebijakan. Rumus IPM sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{1\text{kehatan} + 1\text{pendidikan} + 1\text{pengeluaran} \times 100}$$

Indeks Pendidikan = 1/2 (Indeks harapan lama sekolah + indeks rata-rata lama sekolah).

Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Maka semakin tinggi nilai IPM menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Nilai IPM yang kurang dari 50 digolongkan sebagai

kategori “rendah” rentang antara 50 hingga 79 masuk kriteria menengah dan nilai 80 ke atas merupakan kelompok “tinggi” (Data Strategi, 2015:112).

## **F. Pengeruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen**

### **1. PDRB terhadap tingkat Kemiskinan**

Meningkatnya PDRB dalam proses pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keharusan untuk lebih menunjang keberhasilan dalam pembangunan ekonomi, karena kenaikan PDRB mencerminkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Disisi lain jika proses pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan kesempatan kerja yang memadai, maka akan berdampak ketimpangan pendapatan dan banyak penduduk miskin, dan kemiskinan pada akhirnya akan merubah pola hidup masyarakat untuk menyesuaikan pendapatan yang mereka peroleh sehari-hari.

Pertumbuhan ekonomi ditandai salah satunya meningkatnya PDRB tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih tinggi atau menurun, pertumbuhan ekonomi juga tidak harus diukur atas dasar pertumbuhan PDRB secara menyeluruh, tetapi justru harus melihat sejauh mana distribusi pendapatan yang diperoleh tersebar ke seluruh masyarakat secara merata.

Menurut penelitian Whisnu Adi Saputra (2011) menunjukkan pengaruh yang negatif antara pertumbuhan ekonomi terhadap

kemiskinan, berarti bahwa PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi daerah memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan.

## 2. Pengaruh Pengangguran terhadap tingkat Kemiskinan

Terdapat hubungan yang sangat erat antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Bagi sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu (*part time*) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan bayaran yang tetap di sektor swasta maupun pemerintahan biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat dalam kelas menengah ke atas. Namun demikian, salah jika beranggapan setiap orang yang tidak memiliki pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh merupakan orang kaya. Hal tersebut karena kadangkala ada pekerjaan dipikotaan yang tidak bekerja secara suka rela karena mencari pekerjaan yang lebih baik yang lebih sesuai dengan tingkat kemampuan dan pendidikannya. Sebagian mereka menolak pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber lain yang dapat membantu masalah keuangan mereka (Lincoln.A. 2010 dalam Adhi, 2011).

Dari sekian banyak rumah tangga menggantungkan hidup pada hasil upah atau pendapatan yang diperoleh dari pekerjaannya, jika seseorang kehilangan pekerjaan maka akan berdampak pada

berkurangnya upah atau pendapatan yang diterima dimana yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, lebih parahnya masalah pengangguran ini jika terjadi pada masyarakat yang berpenghasilan rendah atau menengah kebawah, hingga menggeser masyarakat pada garis kemiskinan, hal ini berarti jika terjadi tingkat pengangguran tinggi maka akan berakibat meningkatnya kemiskinan, jadi pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

### 3. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan penduduk yang tinggi pada suatu daerah, apabila tidak didukung dengan keterampilan atau skill yang baik oleh penduduknya serta tersedianya lapangan kerja yang memadai maka akibatnya adalah akan terdapat banyak pengangguran pada suatu daerah, jika tingkat pengangguran tinggi maka akibatnya seseorang tidak menerima upah atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, hal ini menjadi salah satu yang menyebabkan kemiskinan terjadi.

Berdasarkan Todaro (2000), yang menyatakan bahwa tingginya jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan, dibuktikan dengan perhitungan indeks Foster Greer Thorbecke (FGT), ia mengatakan dengan cara uji tersebut, jika jumlah penduduk semakin bertambah dalam suatu daerah maka akan berdampak pada peningkatan kemiskinan.

Selanjutnya dalam penelitian Whisnu Adi Saputra (2011) hasilnya yang menyatakan jika jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang diperolehnya dengan menggunakan data panel.

#### 4. Pengaruh IPM terhadap tingkat Kemiskinan

Hubungan IPM terhadap kemiskinan yaitu berbanding terbalik, ketika tingkat IPM rendah maka tingkat kemiskinan tinggi, apabila tingkat IPM pada suatu daerah rendah hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat pada daerah tersebut rendah, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak atau pekerjaan yang memiliki penghasilan tinggi. Rendahnya penghasilan mengakibatkan seluruh pendapatan atau penghasilan yang diperoleh hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan konsumsi, sehingga tidak mampu memperoleh pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Jika hal tersebut terus terjadi tanpa adanya pemutusan kearah taraf hidup yang lebih baik maka masyarakat tersebut akan selalu berada pada lingkaran kemiskinan.

Selanjutnya terdapat penelitian oleh Prima Sukmaraga (2011) dimana hasil penelitiannya menyatakan, jika variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Tengah.

## G. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2**  
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Variabel	Metode	Hasil
1.	Analisi pengaruh Jumlah penduduk , PDRB, IPM, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/ kota di Jawa Tengah (2005-2008)	Whisnu adhi saputra (2011)	dependen kemiskinan  independen jumlah penduduk, PDRB, dan pengangguran	Regresi Panel Data	Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif & signifikan terhadap kemiskinan, variabel PDRB dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan dan pengangguran berpengaruh negatif tidak signifikan
2.	Analisis Pengaruh PDRB, inflasi dan pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah (1988-2012)	Muchlas amal yusuf (2013)	dependen kemiskinan  independen PDRB, inflasi dan pengangguran	Metode OLS  Regresi berganda linier	Variabel PDRB dan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, tingkat inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan
3.	Analisis Pengaruh PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap	Dio Syah rullah (2014)	dependen kemiskinan  independen PDRB, pendidikan, & pengangguran	Panel data dengan Random Effect Model	PDRB & pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan,

	kemiskinan di Prov. Banten (2009-2012)				variabel pendidikan berpengaruh negatif tidak signifikan, & kemiskinan dipengaruhi signifikan oleh PDRB, pendidikan, & pengangguran secara simultan sebesar 10,78%.
4.	Analisis Pengaruh fakto-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Tengah (2013)	Angga tri widiastuti (2016)	Dependen kemiskinan independen PDRB, pengangguran, jumlah penduduk, IPM	Regresi linier berganda	Variabel PDRB, jumlah penduduk, & IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, jadi variabel itu semua patut di pertimbangkan untuk mengatasi masalah kemiskinan.
5.	Analisis Pengaruh PDRB, pendidikan, pengangguran terhadap kemiskinan di kabupaten/ kota di Jawa Tengah (2005-2009)	Ravi dwi Wijayanto (2010)	Dependen kemiskinan independen PDRB, pendidikan, & pengangguran	Regresi panel	Variabel PDRB berpengaruh negatif tidak signifikan, variabel pendidikan (AMH), dan pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
6.	Analisis Fakto-faktor yang	Kurniawan dedy	dependen kemiskinan	Regresi panel	Variabel pendidikan,

	mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi Maluku Utara (2005-2009)	cahyono (2011)	independen pendidikan, pengangguran, & PDRB		pengangguran dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan
7.	Analisis Pengaruh IPM, PDRB/kapital, dan jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Tengah (2008)	Primasukmawati (2011)	dependen kemiskinan  independen IPM, PDRB, & pengangguran	Regresi linier berganda dengan metode OLS	Variabel IPM dan PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, dan variabel pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.
8.	Analisis Faktor pertumbuhan penduduk, tingkat melek huruf (AMH), dan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan di DIY (2004-2009)	Atikismuningsih (2010)	dependen kemiskinan  independen jumlah penduduk, tingkat melek huruf, & distribusi pendapatan	Panel data Uji Hausman untuk memilih fixed effect atau Random effect	Variabel pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif signifikan, dan variabel AMH dan distribusi pendapatan negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan
9.	Analisis pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan pendidikan (AMH)	Ida Sholekah (2016)	Dependen kemiskinan  independen jumlah penduduk, pengangguran terbuka, pendidikan	data panel	Variabel jumlah penduduk, tingkat pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Jika secara statistik

	terhadap kemiskinan di DKI Jakarta (studi kasus kabupaten/kota Adm di provinsi DKI Jakarta, (2008-2014)				TPT berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
10	Faktor penyebab dan kebijakan pemerintah provinsi DIY menghapus kemiskinan (2014)	Juli Panglima Saragih (2014)	dependen: kemiskinan  independen: pdrb, pendapatan perkapital, jumlah penduduk miskin.	Oldinari Least Square (OLS) dengan software SAS 9.0	Secara normatif pemerintah telah mengidentifikasi kemiskinan dari tahun ke tahun, tapi angka penurunan kemiskinan tidak terlalu signifikan. OLS menunjukkan pengaruh pendapatan perkapital positif signifikan, PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan.

*Sumber: Skripsi, thesis, jurnal.*

## H. Kerangka Penelitian

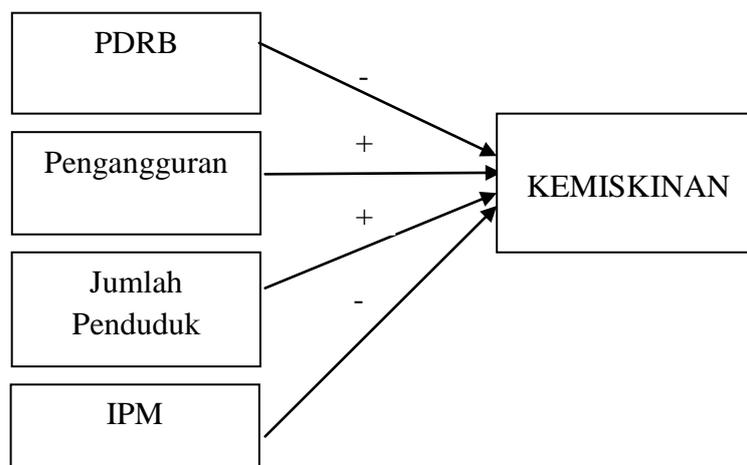
Apabila tingkat kemiskinan rendah maka akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi pada suatu Negara, karena hal tersebut menjadi cerminan maju atau tidaknya suatu Negara. Pertumbuhan ekonomi diukur

dengan pertumbuhan PDRB, pertumbuhan PDRB akan menggambarkan kenaikan output per kapital dalam jangka panjang. Pertumbuhan PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, hal tersebut dapat terjadi karena pertumbuhan ekonomi menyebabkan naiknya tingkat produktifitas ekonomi sehingga mampu meningkatkan tingkat pendapatan serta daya beli masyarakat. Naiknya tingkat pendapatan maka akan mencerminkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pembangunan ekonomi yang baik, perlu dilakukan penciptaan lapangan kerja yang memadai, hal tersebut merupakan keseimbangan yang saling melengkapi, jika lapangan kerja banyak maka akan mengurangi pengangguran. kesejahteraan penduduk merupakan keutamaan yang harus dicapai dalam pembangunan, jika pendapatan mengalami peningkatan, maka tingkat daya beli serta taraf hidup masyarakat juga akan meningkat, maka pengangguran memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi pada suatu daerah, apabila tidak didukung dengan keterampilan atau skill yang baik oleh penduduknya serta tersedianya lapangan kerja yang memadai maka akibatnya adalah akan terdapat banyak pengangguran pada suatu daerah, jika tingkat pengangguran tinggi maka akibatnya seseorang tidak menerima upah atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, hal ini menjadi salah satu yang menyebabkan kemiskinan terjadi. Maka jumlah penduduk memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kemiskinan.

Dalam IPM banyak mencerminkan komponen-komponen yang merupakan cerminan dari kesejahteraan masyarakat. IPM terhadap kemiskinan yaitu berbanding terbalik, ketika tingkat IPM rendah maka tingkat kemiskinan tinggi, apabila tingkat IPM pada suatu daerah rendah hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat pada daerah tersebut rendah, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak atau pekerjaan yang memiliki penghasilan tinggi. Rendahnya penghasilan mengakibatkan seluruh pendapatan atau penghasilan yang diperoleh hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan konsumsi, sehingga tidak mampu memperoleh pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Jika hal tersebut terus terjadi tanpa adanya pemutusan kearah taraf hidup yang lebih baik maka masyarakat tersebut akan selalu berada pada lingkaran kemiskinan. Maka IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Berdasarkan uraian diatas maka alur pemikiran peneliti tentang determinan yang mempengaruhi kemiskinan sebagai berikut :



**Gambar 2.6**  
Kerangka Pemikiran

## **I. Hipotesis**

1. Menduga PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Menduga Pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Menduga Jumlah Penduduk memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Menduga IPM memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.